
INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO

JURNAL AKADEMIKA

<http://ejurnal.iftkledalero.ac.id/index.php/akd/index>

Bonus Demografi Indonesia di Era *Surveillance Capitalism* dan Lahirnya Malapetaka Demokrasi Pasar

Dominikus Zinyo Darling

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

Email: sinyodarling@gmail.com

Abstrak: Tulisan ini mengkaji ketegangan antara optimisme bonus demografi dan ancaman *surveillance capitalism* yang secara diametral membentuk wajah baru demokrasi di Indonesia. Bonus demografi sering dirayakan sebagai momentum emas bagi munculnya partisipasi politik yang segar, inovatif, bebas, dan berbasis energi generasi muda. Namun dalam kenyataannya, ruang kebebasan itu justru dikungkung oleh mekanisme pengawasan digital (*surveillance capitalism*) yang bekerja melalui big data dan algoritma internet. Alih-alih menjadi subjek politik yang otonom, masyarakat diarahkan secara halus untuk mengikuti arus informasi dan preferensi politik yang dikendalikan oleh kepentingan korporasi dan kekuasaan. Penulis membaca bahwa kondisi ini melahirkan situasi yang disebut sebagai malapetaka demokrasi pasar, suatu keadaan ketika demokrasi kehilangan idealnya sebagai ruang deliberatif dan berubah menjadi arena transaksi politik berbasis data dan citra. Dengan menggunakan pendekatan kritis-filosofis, tulisan ini berusaha membuka ruang refleksi atas keadaan ini dan berusaha memberikan proposal untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dari logika pasar. Hal menempatkan artikel ini bukan hanya sebagai sikap skeptis terhadap optimisme bonus demografi, tetapi juga berusaha menjaga agar optimisme itu benar-benar terwujud.

Key Kunci: Bonus Demografi, Demokrasi, Internet, *Surveillance Capitalism*

Pendahuluan

Sejak tahun 2012 hingga 2035, Indonesia memasuki fase bonus demografi, di mana populasi penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menunjukkan bahwa bonus demografi akan mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan estimasi 69,28% warga negara Indonesia

berada dalam kategori produktif.¹ Presentase ini pun diprediksi akan terus meningkat menjadi dua kali lipat (dari jumlah usia non-produktif) di tahun 2045, momen ketika cita-cita Generasi Emas Indonesia sudah terbentuk dengan maksimal.² Bagi para pakar demograf, kondisi ini kerap dipandang sebagai momentum strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas nasional, dan mendorong partisipasi politik yang lebih segar dan dinamis. Dalam konteks demokrasi, narasi besar yang berkembang adalah bahwa dominasi generasi usia produktif dapat menjadi motor bagi konsolidasi demokrasi, karena partisipasi politik mereka diyakini akan lebih aktif, kritis, dan progresif.³ Hal ini pun dipertegas oleh begitu banyak kajian-kajian terdahulu dari beberapa lembaga negara yang sepakat bahwa bonus demografi “seolah-olah” otomatis juga menjadi bonus demokrasi untuk Indonesia.⁴

Namun, optimisme tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks di mana bonus demografi itu berlangsung. Nyatanya, bonus demografi Indonesia hadir bukan di ruang sosial-politik yang netral. Ia berada di tengah menguatnya era *surveillance capitalism*, sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Shoshana Zuboff untuk menggambarkan wajah baru kapitalisme neoliberal.⁵ Dengan internet sebagai sarana utama, era ini menempatkan data personal dan perilaku digital manusia sebagai komoditas yang diperdagangkan. Aktivitas sehari-hari masyarakat di ruang digital direduksi menjadi “surplus perilaku” yang dipanen, dianalisis, dan kemudian diperdagangkan untuk memprediksi serta memengaruhi kesadaran dan tindakan manusia, termasuk kesadaran politik.

Internet pada mulanya diharapkan menjadi ruang publik baru yang memperluas kebebasan berekspresi dan partisipasi warga negara. Beberapa penelitian terdahulu bahkan membaca bahwa teori demokrasi deliberatif yang dirumuskan oleh Jürgen Habermas akan mendapatkan tempat yang lebih baik seiring perkembangan internet.⁶ Namun, kenyataan menunjukkan arah yang berbeda. Teknologi digital tidak lagi netral, tetapi dikuasai oleh kepentingan ekonomi-politik korporasi global yang menambang data dan membentuk perilaku melalui algoritma prediktif. Zuboff menjelaskan bahwa kapitalisme pengawasan beroperasi melalui apa yang ia sebut *behavioral surplus*, yakni data perilaku pengguna yang diproses untuk memprediksi dan mengarahkan tindakan di masa depan (pembahasan di batasi pada mekanisme

¹ BPS Indonesia, *Analisis Profil Penduduk Indonesia: Mendeskripsikan Peran Penduduk dalam Pembangunan* (Online: Badan Pusat Statistik, 2022), hlm. 55. <https://share.google/vAC0NBVBvrS7NUfLc>. Diakses pada 10 Oktober 2025.

² *Ibid.*, hlm. 56.

³ Achmad Nur Sutikno, “Bonus Demografi di Indonesia,” dalam *VISIONER: Jurnal Pemerintahan daerah Di Indonesia*, Vol. 12, No. 1 (2020), hlm. 421-439. <https://doi.org/10.54783/jv.v12i2.285>.

⁴ Edbert Gani Suryahudaya, “Bonus Demografi dan Bonus Demokrasi,” dalam *Kompas.id* (21 November 2022). <https://app.kompas.as/AebLkFskXG5mVgYV6>. Diakses pada 10 Oktober 2025.

⁵ Bdk. Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power* (New York: Public Affairs, 2019).

⁶ Paulus Pati Lewar & Otto Gusti Ndegong Madung, “Demokrasi Sebagai Diskursus dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas,” dalam *Jurnal Ledalero*, Vol. 21, No. 2 (Desember 2022), hlm. 158-159. <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v21i2.314.150-161>.

perekonomian pasar).⁷ Dalam ranah politik, mekanisme ini menjelma menjadi logika pengelola opini publik, yang secara halus memanipulasi persepsi dan preferensi politik masyarakat warga. Partisipasi politik tidak dibentuk atas dasar kesadaran demoktatis, tetapi oleh kekuatan besar yang ada di balik internet.

Tulisan ini merupakan ikhtiar penulis untuk mengkaji secara kritis relasi antara bonus demografi dan praktik demokrasi Indonesia dalam konteks menguatnya kapitalisme pengawasan. Asumsi yang mendasari penulisannya bahwa generasi produktif yang lahir dan tumbuh di era digital bukan hanya menjadi aktor utama pembangunan ekonomi, tetapi juga subjek yang secara politik dibentuk dan diarahkan oleh kekuatan teknologi serta logika kapital global. Dengan demikian, tulisan ini hendak menunjukkan bahwa keberhasilan Indonesia memanfaatkan bonus demografi tidak semata bergantung pada jumlah penduduk usia produktif, tetapi pada sejauh mana kesadaran politik generasi muda mampu terbebas dari dominasi algoritmik dan manipulasi data yang melingkupi ruang digital. Tulisan ini berupaya mengusulkan pembacaan baru bahwa bonus demografi hanya akan menjadi bonus demokrasi apabila ruang digital dapat direbut kembali sebagai ruang publik yang bebas dari hegemoni kapitalisme pengawasan.

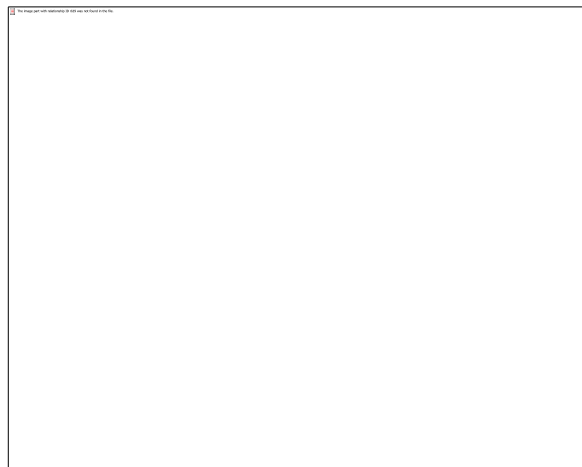
Adapun metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penulisan adalah studi kualitatif dengan berkisar pada dua titik. *Pertama*, analisis data tentang bonus demografi sebagaimana diterbitkan oleh beberapa lembaga negara dan lembaga swasta. Bagian ini juga akan diikuti dengan perkembangan optimisme bonus demografi terhadap penguatan demokrasi dan demokratosasi di Indonesia. Fokusnya adalah orang-orang muda yang adalah kelompok usia produktif sebagaimana diidealkan dalam cita-cita bonus demografi. *Kedua*, penempatan gagasan Shoshana Zuboff tentang *surveillance capitalism* untuk membaca sejauh mana bonus demografi dapat berjalan dalam dunia internet yang dikuasai oleh kekuatan kapital yang mengawasi masyarakat melalui internet. Analisis ini menuju pada kesimpulan bahwa *surveillance capitalism* dapat menjadi tantangan serius terhadap usaha mengoptimalkan bonus demografi dalam memajukan demokrasi. Penulis membahas ini dalam suatu pembahasan kunci yang diberi judul "Lahirnya Malapetaka Demokrasi Pasar." Namun, tulisan ini tidak berhenti pada usaha membaca bahaya tersebut. Bagain terakhir akan diuraikan beberapa ikhtiar untuk menyelamatkan optimisme bonus demografi di bawah tekanan era *surveillance capitalism*.

Fenomena Bonus Demografi di Indonesia

Secara historis, tanda-tanda awal munculnya bonus demografi di Indonesia mulai tampak sejak awal dekade 1990-an, terutama setelah keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) nasional. Awalnya program ini lahir dari paradigma pembangunan yang kala itu dominan yaitu *developmentalisme* yang beranggapan bahwa pertumbuhan penduduk yang berlebihan

⁷ Shoshana Zuboff, "Surveillance Capitalism and the Challenge of Collective Action," dalam *New Labour Forum*, Vol. 28, No. 1 (2019), hlm. 11-12. <https://doi.org/10.1177/1095796018819461>.

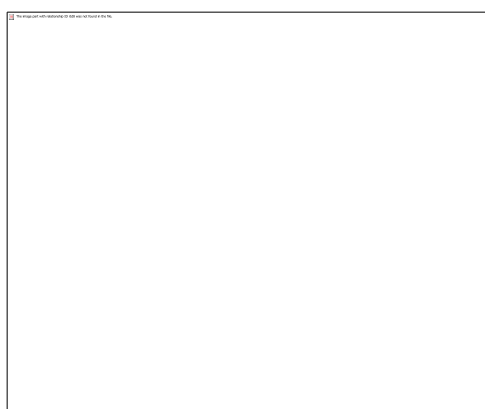
berkorelasi langsung dengan meningkatnya kemiskinan.⁸ Dalam hal ini, pengendalian pertumbuhan penduduk dipandang sebagai langkah untuk memperbaiki kualitas hidup sekaligus



mengurangi beban ekonomi negara (Indonesia sebagai negara miskin). Berbeda dengan negara-negara maju yang menjalankan kebijakan KB semata untuk mengendalikan tingkat fertilitas, negara-negara berkembang seperti Indonesia memaknainya sebagai strategi ekonomi yaitu untuk menekan laju kelahiran dan mempercepat modernisasi masyarakat agraris yang masih tertinggal. Alhasil, selama tiga dekade penerapannya, kebijakan ini terbukti berhasil mengubah struktur umur penduduk. Jumlah anak-anak dan remaja di bawah usia 15 tahun yang

semula mendominasi bagian dasar piramida penduduk berangsur menurun, sementara kelompok usia produktif (15-64 tahun) meningkat tajam. Hal ini berimplikasi pada menurunnya rasio ketergantungan (usia produktif terhadap usia non-produktif).

Secara statistik, gambaran tentang perkembangan bonus demografi Indonesia dapat dilihat melalui pemetaan grafik berikut. **Gambar 1** adalah grafik jenjang kemunculan bonus demografi di Indonesia dengan titik tolak hasil sensus penduduk Indonesia sejak tahun 1950-2005. Penanda kotak dalam grafik menunjukkan jendela peluang (*oppurtunity window*) dari periode bonus demografi. Sementara (**gambar 2**) menunjukkan grafik prediksi rasio ketergatangan masyarakat Indonesia.



⁸ Wasisto Raharjo Jati, "Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang atau Jendela Bencana di Indonesia?" dalam *Populasi: Jurnal Kependudukan dan Kebijakan*, Vol. 23, No. 1 (2015), hlm. 3-4. <https://doi.org/10.22146/jp.8559>.

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa periode 2010-2025 merupakan fase ketika Indonesia mengalami puncak bonus demografi. Pada masa ini, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai proporsi tertinggi dibandingkan dengan kelompok usia muda (0-14 tahun) dan lanjut usia (65 tahun ke atas). Penurunan tajam pada kelompok usia muda yang disertai peningkatan populasi usia produktif menunjukkan terjadinya pergeseran struktur demografi yang sangat signifikan (Gambar 1). Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2019 kemudian memperkuat hal ini dengan mencatat bahwa rasio ketergantungan penduduk Indonesia menurun hingga sekitar 45,4% pada tahun 2022, yang menandai kondisi ideal di mana beban penduduk non-produktif terhadap penduduk produktif berada pada titik terendah.⁹ Pemerintah kemudian menegaskan bahwa periode 2010–2025 adalah momentum strategis yang disebut sebagai *window of opportunity*, ketika produktivitas nasional berpotensi meningkat pesat jika diiringi kebijakan ekonomi dan pendidikan yang tepat.¹⁰

Selanjutnya, jika dilihat dari tren garis dalam grafik, dominasi penduduk usia produktif diproyeksikan akan terus berlanjut hingga sekitar tahun 2050. Meskipun jumlah penduduk lanjut usia menunjukkan peningkatan, proporsi penduduk produktif tetap menjadi yang terbesar sepanjang periode tersebut. Hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa sampai pada pertengahan abad ini, sekitar 64% dari total populasi Indonesia masih berada dalam usia produktif, menandakan keberlanjutan dari fase bonus demografi. Inilah yang kemudian menjadi acuan bagi pemerintah menggagaskan visi Indonesia Emas, dengan berpijak dari panen deviven demografis. Visi jangka panjang ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi tenaga kerja muda sebagai modal utama pembangunan ekonomi dan demokrasi yang berkelanjutan.

Bonus Demografi dan Optimisme Demokratisasi: Kekuatan Generasi Muda

Meski awalnya strategi KB yang menghasilkan periode bonus demografi dilakukan sebagai strateg intervensi ekonomi, optimisme terhadap bonus demografi kini tidak hanya muncul dalam ranah ekonomi. Ia telah menjalar ke ranah politik, terutama dalam konteks demokrasi dan demokratisasi. Generasi muda yang mendominasi struktur penduduk Indonesia

⁹ Bappenas, Visi Indonesia Emas 2045 (Jakarta: Tim Bappenas, 2019), hlm. 20-21. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Dokumen%20lengkap%202045_final.pdf. Diakses pada 10 Oktober 2025.

¹⁰ M. Zaid Wahyudi, "Bonus Demografi tidak Terjadi Tahun 2030-2045, dalam *Kompas.id* (29 April 2025). <https://www.kompas.id/artikel/bonus-demografi-tidak-terjadi-di-tahun-2030-2045>. Diakses pada 10 Oktober 2025.

diyakini menjadi katalis bagi munculnya demokrasi yang lebih terbuka, egaliter, dan partisipatif. Semua data pemerintah tentang besarnya populasi generasi produktif di era bonus demografi memperlihatkan bahwa masa depan politik Indonesia sesungguhnya berada di tangan generasi yang tumbuh dalam kultur digital, dan memiliki akses luas terhadap informasi. Kondisi ini memunculkan harapan bahwa proses demokratisasi Indonesia akan menemukan energi baru melalui partisipasi politik kaum muda yang lebih kritis terhadap isu kebebasan, keadilan sosial, dan transparansi kekuasaan.¹¹ Hal ini diyakini menunjang keberhasilan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia di segala lini, yakni reformasi birokrasi.

Optimisme ini kemudian diperkuat oleh penelitian Hasbullah Azis yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterlibatan politik generasi muda di ranah non-elektoral, seperti gerakan sosial, kampanye digital, dan advokasi kebijakan publik.¹² Generasi muda dianggap membawa semangat *participatory democracy*, demokrasi yang menekankan keterlibatan langsung warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Mereka tidak lagi hanya bergantung pada partai politik atau institusi formal, tetapi menggunakan media sosial sebagai ruang baru untuk membangun solidaritas politik dan mengartikulasikan suara-suara yang sebelumnya terpinggirkan. Gerakan sosial seperti #ReformasiDikorupsi atau #SaveKPK menjadi contoh konkret bagaimana energi demografis ini bekerja melalui "partisipasi spontan," lintas kelas, dan mengandalkan jejaring digital untuk memperkuat kesadaran politik kolektif.

Selain itu, bonus demografi juga membawa efek struktural terhadap regenerasi politik nasional. Kajian-kajian terbaru menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah pemilih muda telah mendorong partai politik untuk beradaptasi dengan gaya komunikasi yang lebih terbuka, interaktif, dan digital-friendly. Para elite politik dipaksa untuk memahami logika politik baru yang digerakkan oleh isu, bukan oleh figur atau loyalitas tradisional. Dalam hal ini, bonus demografi berfungsi sebagai tekanan moral terhadap politik lama yang tertutup dan elitis. Demokratisasi bukan hanya soal prosedur elektoral, tetapi juga transformasi budaya politik yang menempatkan kesetaraan, transparansi, dan rasionalitas sebagai nilai utama.

Dalam konteks inilah, bonus demografi bukan sekadar angka statistik, melainkan proses sosial yang menentukan arah evolusi politik Indonesia. Generasi muda yang menjadi inti dari bonus ini tidak hanya menghadirkan jumlah, tetapi juga nilai yakni harapan akan demokrasi yang lebih otonom, rasional, dan berkeadilan. Mereka adalah agen pembaruan yang mampu menembus kebakuan politik lama dan menawarkan harapan baru tentang kewargaan. Optimisme terhadap demokratisasi, dengan demikian, bukanlah utopia yang kosong, melainkan cita-cita yang dapat diwujudkan jika negara mampu menciptakan ekosistem politik yang mendukung

¹¹ Christiany Judhita, "Demokrasi di Media Sosial: Kasus Polemik rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah," dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 1 (2016), hlm. 1-15. <https://media.neliti.com/media/publications/231005-demokrasi-di-media-sosial-kasus-polemik-94e515fe.pdf>.

¹² Hasbullah Azis, "Dampak Media Baru terhadap Partisipasi dan Keterlibatan Politik Anak Muda: Sebuah Tinjauan Studi Empiris," dalam *Jurnal Common*, Vol. 8, No. 2 (2024), hlm. 148-163. <https://doi.org/10.3410/common.v8i2.12823>.

tumbuhnya kesadaran kritis, kebebasan berpikir, dan tanggung jawab sosial di kalangan generasi muda.

Ruang Digital (Internet) sebagai Medan Demokratisasi Indonesia Saat ini dan Masa Depan

Setelah melihat kajian-kajian yang hampir semuanya berisi optimisme di atas, sekarang tulisan ini akan memberikan analisis tandingan berupa antitesis (untuk menghindari penggunaan kata pesimis) terhadap optimisme yang dibangun oleh pemerintah. Bagian ini akan didahului dengan upaya membaca data-data tentang keberadaan "masyarakat produktif," yang merupakan hasil dari bonus demografi. Secara umum, peraoalan yang hendak dikaji adalah kenyataan bahwa generasi muda hidup dalam lingkaran ruang digital (internet).

Ruang digital di Indonesia telah menjadi arena yang semakin penting bagi partisipasi dan interaksi politik. Berdasarkan survei terbaru Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5% pada awal 2024. Dalam kelompok usia muda, misalnya generasi Z (12-27 tahun) penetrasi tercatat sekitar 87,02%, dan generasi milenial (28-43 tahun) sekitar 93,17%.¹³ Angka-angka ini menegaskan bahwa hampir seluruh generasi muda kini tersambung ke internet, sebuah kondisi yang membentuk dasar bagi pengaktifan ruang digital sebagai ruang demokrasi.

Data lebih lanjut menunjukkan bagaimana generasi muda menggunakan ruang digital untuk mencari dan mengonsumsi informasi politik. Sebagai contoh, survei dari *Katadata Insight Center* (KIC) pada Oktober 2023 menunjukkan bahwa 71,6 % responden muda (Gen Z & milenial) menggunakan media daring (online media) sebagai sumber utama untuk mendapatkan profil calon presiden/wakil presiden. Untuk media sosial spesifik, platform Instagram dipakai oleh 66,2 % responden muda sebagai saluran memperoleh informasi politik. Ini memperlihatkan bahwa pilihan platform digital bukan sekadar tambahan, tetapi sudah menjadi jalur utama bagi kaum muda dalam konteks politik. Hal yang sama pun sebenarnya ditemukan dalam laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025 yang bahwa pada tahun 2024 informasi di internet yang paling banyak diakses adalah konten politik, sosial, hukum, dan HAM yang mencapai 19,18%, meskipun pada tahun 2025 kembali turun menjadi 14,90% (berada di bawah konten olahraga yang mencapai 15,37%).¹⁴

Selain itu, berangkat dari fakta seputar pemilu dalam beberapa tahun terakhir, internet memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan pemahaman orang muda (kelompok produktif) tentang kandidat legislatif dan eksekutif.¹⁵ Penetrasi konten-konten di media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, X, YouTube membuat generasi pemilih memiliki akses yang luas

¹³ APJII, *Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Pengguna Internet* (APJII: Online, 2025). <https://survei.apjii.or.id/survei/group/11>. Diakses pada 13 Oktober 2025.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 84-85.

¹⁵ Dimaz Oktama Andriyendi, dkk., "Media Sosial dan Pengaruhnya terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pilkada" dalam *JECCO: Jurnal of Education, Cultural and Politics*, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 101-111. <https://doi.org/10.24036/jecco.v3i1.172>.

dan mudah dalam mencari dan menemukan informasi-informasi sosial politik. Internet bisa mengintervensi kesenjangan informasi yang belum tersentuh beberapa dekade lalu.

Dari semua data tersebut, bisa dirangkum beberapa poin penting: (1) Tingkat akses internet bagi generasi muda di Indonesia sangat tinggi dan terus meningkat; (2) Internet dan media sosial telah menjadi sumber utama informasi politik bagi kaum muda; (3) Media sosial juga berfungsi sebagai ruang diskusi dan partisipasi politik bagi sebagian generasi muda; (4) Intensi dan pola partisipasi digital sangat bergantung pada platform, konteks, dan literasi pengguna; (5) Meskipun akses dan keaktifan digital tinggi, proporsi yang menggunakan ruang digital sebagai jalur partisipasi politik langsung (misalnya bergabung kampanye, organisasi politik) masih berbeda dibanding konsumsi informasi atau hiburan.

Kenapa fakta-fakta ini penting? Karena data ini menunjukkan bahwa ruang digital kini bukan lagi tambahan dari ruang politik tradisional, tetapi telah menjadi elemen integral dari kehidupan politik generasi muda Indonesia. Ruang internet, melalui *smartphone* dan media sosial, menjadi medan di mana identitas politik dipelajari, disuarakan, dan dikonstruksi. Generasi yang punya akses luas ini memiliki potensi untuk memperluas ruang partisipasi, memotong batas geografis dan sosial yang selama ini membatasi peran warga negara.

Surveillance Capitalism: Wajah Gelap Internet

Surveillance capitalism atau kapitalisme pengawasan merupakan bentuk baru dari sistem ekonomi digital yang berakar pada eksploitasi data perilaku manusia. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Shoshana Zuboff, profesor emeritus Harvard Business School, dalam karya monumentalnya *The Age of Surveillance Capitalism* (2019). Ia mendefinisikan fenomena ini sebagai “klaim sepihak atas pengalaman manusia sebagai bahan mentah yang dapat diterjemahkan menjadi data perilaku untuk diproses kemudian dijadikan sebagai basis untuk intervensi pasar”¹⁶ Artinya, manusia bukan lagi hanya konsumen, tetapi juga sekaligus komoditas yang terus menghasilkan data untuk dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan digital raksasa (oligopoli).¹⁷ Hal ini sebenarnya menegaskan apa yang dikatakan oleh Dr. Alexander Jebadu SVD tentang kapitalisme-neoliberal sebagai “drakula” yang mengeksploitasi seluruh aspek kehidupan manusia.¹⁸

Berbeda dengan kapitalisme industri yang mengeksploitasi tenaga kerja fisik, kapitalisme pengawasan mengeksploitasi perilaku dan pengalaman pribadi. Mekanismenya beroperasi melalui proses yang disebut *behavioral surplus* yaitu kelebihan data yang dikumpulkan dari aktivitas pengguna di platform digital, seperti penelusuran internet, lokasi yang dikunjungi, interaksi di media sosial, hingga ekspresi wajah yang terekam oleh kamera perangkat

¹⁶ Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*, Loc. Cit.

¹⁷ Shoshana Zuboff, “Surveillance Capitalism and the Challenge of Collective Action,” *Op Cit.*, hlm. 21.

¹⁸ Alexander Jebadu SVD, *Drakula Abad ke-21* (Mauere: Ledalero, 2020), hlm. viii.

pintar.¹⁹ Data ini tidak hanya disimpan, tetapi dianalisis menggunakan algoritma pembelajaran mesin (*machine learning*) untuk membangun profil psikologis dan pola kebiasaan pengguna.²⁰ Dari sinilah terbentuk apa yang disebut Zuboff sebagai *prediction products*, produk prediksi perilaku yang kemudian dijual kepada pengiklan, perusahaan, maupun institusi lain yang berkepentingan.

Pola kerja kapitalisme pengawasan dapat dijelaskan dalam tiga tahap utama. *Pertama*, tahap *data extraction* atau ekstraksi data, di mana setiap tindakan digital pengguna dikumpulkan oleh sistem tanpa disadari. Ketika seseorang mengklik tautan, mengetik kata di mesin pencari, atau sekadar menggulir layar media sosial, semua itu menjadi sumber data yang berharga. *Kedua*, tahap *data analysis and transformation*, di mana data tersebut diolah dengan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pola perilaku dan preferensi individu. *Ketiga*, tahap *behavioral modification*, yaitu penerapan hasil analisis tersebut untuk memengaruhi perilaku pengguna, baik melalui iklan yang dipersonalisasi maupun algoritma rekomendasi konten. Proses ini berjalan terus-menerus, membentuk lingkaran umpan balik (*feedback loop*) yang semakin memperdalam pengetahuan perusahaan tentang setiap individu.²¹

Lebih lanjut, penerapan pola ini didukung oleh berbagai elemen utama dari sistem ini terdiri atas empat komponen besar yaitu data, algoritma, platform, dan infrastruktur jaringan. *Pertama*, data adalah bahan baku utama. Ia dikumpulkan dalam volume yang sangat besar, mencakup data eksplisit (seperti postingan, pesan, atau status) maupun data implisit (seperti kecepatan mengetik, waktu aktif, hingga posisi geografis). *Kedua*, algoritma berfungsi sebagai otak yang menafsirkan data. Ia bekerja menggunakan model matematis kompleks untuk mengenali pola, memprediksi keinginan, dan mengarahkan perhatian manusia. *Ketiga*, platform seperti Google, Meta, Amazon, dan masih banyak yang lain, menjadi ekosistem tempat interaksi dan pengumpulan data terjadi. Platform tidak hanya sebagai medium komunikasi, melainkan sebagai mesin pengawasan terintegrasi yang mengatur bagaimana informasi disebar dan dikonsumsi. *Keempat*, infrastruktur jaringan meliputi segala bentuk konektivitas digital makro seperti server, satelit, kabel bawah laut, hingga pusat data global yang menyimpan dan memproses triliunan bit informasi setiap detiknya.²²

Namun, meskipun kapitalisme pengawasan memanfaatkan teknologi seperti algoritma, sensor, kecerdasan buatan, dan platform digital, Zuboff sendiri mengatakan bahwa ia tidak dapat direduksi hanya menjadi salah satu dari unsur tersebut. Semua teknologi itu hanyalah sarana

¹⁹ Shoshana Zuboff, *Op Cit.*, hlm. 13-17.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

²¹ *Ibid.*, hlm. 11-29.

²² *Ibid.*

pendukung, seperti tulang dan otot dalam tubuh, sementara kapitalisme pengawasan adalah jaringan pengikat yang mengarahkan keseluruhan sistem teknologi itu agar beroperasi sesuai dengan kepentingan ekonomi tertentu. Zuboff menegaskan bahwa kapitalisme pengawasan adalah ciptaan ekonomi baru, bukan sekadar kemajuan teknologi. Karena bersifat ekonomi, ia seharusnya dapat menjadi objek perdebatan, pengawasan, dan pembatasan dalam sistem demokrasi. Namun, dalam praktiknya, kapitalisme pengawasan justru lebih kejam dan kompleks daripada sekadar algoritma atau mesin pembelajar, sebab ia merupakan hasil perkawinan antara internet dan kekuatan ekonomi neoliberalisme. Perpaduan inilah yang membuatnya mampu menanamkan logika pasar bebas yang eksploitatif ke dalam ruang digital, sehingga kehidupan manusia semakin tunduk pada mekanisme ekonomi yang dikendalikan oleh segelintir korporasi teknologi besar.

Menurut Ferdinandus Jehalut dalam salah satu artikelnya di *Jurnal Ledalero*, salah satu ciri khas kapitalisme pengawasan adalah sifatnya yang otomatis dan tidak kasat mata.²³ Pengguna jarang menyadari bahwa mereka sedang diawasi atau dianalisis, karena prosesnya terjadi di balik layar dalam waktu nyata. Di sinilah letak kekuatannya. Ia beroperasi dengan prinsip *asymmetric knowledge*, yaitu ketimpangan pengetahuan antara pengumpul data dan pemilik data. Pengguna mengetahui sedikit tentang bagaimana datanya digunakan, sementara perusahaan memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang perilaku pengguna. Ketimpangan ini menciptakan bentuk baru dari kekuasaan informasi yang bersifat prediktif. Konsekuensinya, siapa yang tahu lebih banyak tentang perilaku manusia, dialah yang menguasai arah interaksi sosial dan ekonomi-politik digital.

Perihal pembacaan dalam konteks demokrasi, Zuboff sendiri menjelaskan demikian: "*The competition for surveillance revenues bears down on our bodies, our automobiles, our homes, and our cities, challenging human autonomy and democratic sovereignty in a battle for power and profit as violent as any the world has seen.*"²⁴ Artinya, *surveillance capitalism* memiliki implikasi kuat terhadap pembentukan struktur kekuasaan dalam suatu negara. Nyatalah apa yang dikatakan oleh Dr. Alexander Jebadu SVD bahwa kekuatan logika kapitalisme sebenarnya tidak pernah mati (berhenti) menggerogoti semua negara bahkan yang paling demokratis sekalipun.²⁵ Mengenai bagaimana *surveillance capitalism* membentuk dinamika kekuasaan dalam demokrasi Indonesia, bagai berikut akan diuraikan dalam beberapa poin.

Implikasi terhadap Demokrasi Indonesia: Lahirnya Malapetaka Demokrasi Pasar

²³ Ferdinandus Jehalut, "Ekonomi Politik, Internet, dan Demokrasi," dalam *Jurnal Ledalero*, Vol. 22, No. 1 (2023), hlm. 30. <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v22i1.333.20-38>.

²⁴ Shoshana Zuboff, *Loc Cit.*

²⁵ Alexander Jebadu SVD, *Op Cit.*, hlm. 238-242.

Dalam konteks Indonesia, pengaruh *surveillance capitalism* terhadap kehidupan demokrasi tampak begitu nyata dan kompleks. Ketika logika ekonomi digital bertemu dengan logika politik elektoral, yang lahir adalah bentuk demokrasi baru yang (oleh penulis) disebut sebagai demokrasi pasar, yakni demokrasi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemasaran (*market sphere*), bukan kesadaran publik (*public sphere*). Ruang demokrasi yang seharusnya menjadi arena pertukaran gagasan dan refleksi bersama kini bergeser menjadi pasar opini yang diatur oleh algoritma, data, dan modal digital. Dalam tatanan ini, kebenaran publik bukan lagi hasil dari perdebatan rasional, melainkan hasil dari transaksi antara kepentingan ekonomi, politik, dan teknologi.

Fenomena ini terlihat jelas dalam cara aktor-aktor politik di Indonesia memanfaatkan *surveillance capitalism* untuk memperkuat politik pencitraan. Melalui teknologi pengumpulan data digital, tim kampanye politik mampu memetakan preferensi masyarakat dengan sangat rinci, dari minat pribadi hingga afiliasi ideologis untuk kemudian menciptakan citra yang sesuai dengan selera segmen pemilih tertentu. Kandidat politik tak lagi menjual ideologi, tetapi “menjual” kepribadian digital yang sudah dikalkulasi agar terlihat autentik dan menarik di mata publik. Strategi ini bekerja dengan logika yang sama seperti iklan komersial yaitu bukan menyampaikan kebenaran, melainkan membentuk persepsi. Dengan dukungan *big data analytics*, mereka dapat mengetahui isu apa yang paling menggugah emosi massa, kapan harus memposting konten tertentu, bahkan kata apa yang paling efektif digunakan dalam narasi digital.

Skandal besar yang melibatkan Facebook dan *Cambridge Analytica* (CA) merupakan salah satu contoh bahaya besar kekuatan *surveillance capitalism* dalam kehidupan demokrasi. Dikisahkan bahwa pada selama periode 2013-2014 CA melakukan *minning* data pribadi pengguna Facebook di Amerika Serikat. CA menggunakan skema kuis sederhana “*This Your Digital Life*.” Data itu dianalisis menggunakan pendekatan psikologis, yang kemudian berhasil mengelompokkan semua responden berdasarkan *trait* kepribadian. Ternyata pada tahun 2016, data ini digunakan oleh CA untuk menyusun strategi kampanye kemenangan Donald Trump. Hasilnya, dengan gaya kampanye emosional (politisasi sentimen populis), Trump berhasil memenangkan pemilu 2016 dengan selisih suara yang besar.²⁶ Kampanyenya sangat emosional dan sangat sedikit menggaungkan ide akademik. Meski tidak melibatkan skandal yang mirip, penulis membaca bahwa, kemenangan Prabowo-Gibran dalam pilpres 2024 sebenarnya didukung oleh logika ini. Dengan menggunakan analisis terhadap daya emosional (misalnya manipulasi karakter “Gemoy” di media sosial),²⁷ Prabowo-Gibran mendapatkan dukungan kuat dari

²⁶ Monica Arenas Ramiro, “Partidos Politicos, Opiniones E Internet: La Leison Del Derecho A La proteccion De Datos Personales,” dalam *Teoria y Realidad Constitucional*, Vol. 44 (2019), hlm. 341-372. Diakses melalui *Proquest Research Library* (Akun IFTK Ledalero).
<https://www.proquest.com/docview/2420727124/fulltext/75993405C0154986PQ/1?accountid=215812&sourcetype=Scholarly%20Journals>.

²⁷ Ariel Jonathan, dkk., “Pengaruh Penggunaan Istilah *Gemoy* terhadap Citra Politik Calon Presiden dalam Pemilu 2024,” dalam *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 3, No. 6 (2024). Hlm. 83-89. <https://doi.org/10.56799/jim.v3i6.3388>.

kalangan generasi muda, generasi yang digadang sebagai aktor yang bisa menghidupkan demokrasi di masa depan.²⁸

Dalam situasi seperti ini, gaya politik yang paling mudah mendapatkan panggung adalah populisme. *Surveillance capitalism* menyediakan infrastruktur bagi populisme untuk berkembang pesat karena sistem algoritmik cenderung mempromosikan konten yang bersifat emosional, simplistik, dan memecah-belah (semua ciri khas populisme).²⁹ Tokoh populis tidak perlu lagi membangun argumen rasional tetapi cukup menampilkan diri sebagai “suara rakyat” melawan “elit jahat,” dan algoritma media sosial akan bekerja otomatis memperluas jangkauannya. Pola ini tampak jelas dalam pemilu Indonesia belakangan, di mana isu-isu sensasional lebih sering menjadi perbincangan utama ketimbang debat kebijakan substantif. Polarisasi sosial pun meningkat, bukan karena perbedaan ideologis yang sehat, tetapi karena desain sistem digital yang memang memperkuat keterbelahan demi menjaga atensi pengguna. Populisme sungguh menghancurkan karakter bangsa Indonesia yang terbentuk atas keragaman etnis, agama, namun di saat yang sama tetap toleran untuk mencapai kebaikan bersama.³⁰ Otto Gusti Madung menyebut bahwa di Indonesia gaya populisme mencapai puncak (keburukannya) di era kepemimpinan Joko Widodo.³¹

Selain itu, fenomena penggunaan demagog politik (*buzzer*) juga dapat dibaca sebagai manifestasi paling konkret dari logika *surveillance capitalism* dalam demokrasi Indonesia. Awalnya, *buzzer* hanyalah alat pemasaran dalam dunia bisnis digital, sebuah profesi untuk mempromosikan produk atau merek dengan memanfaatkan jaringan media sosial.³² Namun, dalam lanskap politik kontemporer, *buzzer* berevolusi menjadi aktor politik yang memiliki kekuatan signifikan dalam membentuk opini publik. Mereka tidak lagi menjual barang, tetapi menjual narasi politik. Dengan memanfaatkan algoritma media sosial dan data perilaku pengguna, *buzzer* mampu memengaruhi arah percakapan publik secara masif, menciptakan persepsi yang seolah-olah organik padahal sepenuhnya terencana.

Peran *buzzer* di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari logika pasar informasi yang diciptakan oleh kapitalisme pengawasan. Mereka beroperasi layaknya agen periklanan dalam dunia politik, bekerja untuk pihak yang memiliki modal paling besar. Konsekuensinya, ruang publik digital mengalami reduksi fungsi dari *public sphere* (ruang refleksi dan deliberasi)³³ menjadi *market sphere* (ruang transaksi dan komodifikasi opini). Yang menentukan dominasi bukan lagi kekuatan argumen, tetapi kekuatan modal dan jaringan distribusi informasi.

²⁸ Fika Nurul Ulya & Icha Rastika, “Survei Indikator: Pemilih Prabowo Banyak dari Gen Z dan Milenial, Pemilih Ganjar Dominasi Kalangan Tua,” dalam *Kompas.com* (21 Februari 2024).

²⁹ Otto Gusti Madung, “Populisme, Demokrasi, Disensus dan Relevansinya untuk Indonesia,” dalam Mathias Daven & Georg Kirchberger, *Sebuah Pertanyaan Kenangan 50 Tahun STFK Ledalero* (Maumere: Ledalero, 2019), hlm. 144-149.

³⁰ Felix Baghi, *Kewargaan Demokratis dalam Sorotan Filsafat Politik* (Maumere: Ledalero, 2009), hlm. 261-262.

³¹ *Ibid.*, hlm. 154-161.

³² Shidiq Sugiono, “Fenomena Industri Buzzer di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media” dalam COMMUNICATUS: Jurnal Ilmu Komunikasi, 4:1 (2020), hlm. 47-66. <https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.7250>.

³³ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 126.

Siapa yang memiliki dana lebih besar, ia dapat “membeli” ruang kesadaran publik melalui kampanye digital yang massif dan terukur. Dalam konteks ini, demokrasi kehilangan sifat egaliternya. Kebebasan berbicara memang masih ada, tetapi tidak semua suara memiliki daya jangkauan yang sama.

Lebih jauh lagi, *buzzer* politik di Indonesia sering kali digunakan untuk menciptakan noise, kebisingan informasi yang bertujuan mengaburkan kebenaran. Mereka membanjiri ruang digital dengan narasi tandingan, menyerang lawan politik dengan disinformasi, dan memproduksi *trending topics* untuk menggeser isu penting dari perhatian publik. Praktik ini menggambarkan pergeseran demokrasi dari arena dialog menjadi arena dominasi wacana. Kebebasan berekspresi yang menjadi nilai dasar demokrasi justru dipelintir menjadi instrumen untuk mengontrol persepsi massa. Dalam konteks ini, *surveillance capitalism* menyediakan teknologi dan data, sementara aktor politik menyediakan narasi dan modal. Keduanya berpadu dalam sistem yang menjadikan kesadaran publik sebagai objek produksi ekonomi-politik.

Berbagai kenyataan di atas memperlihatkan bahwa demokrasi pasar di Indonesia tidak hanya mencerminkan krisis etika politik, tetapi juga krisis epistemik, yaitu menurunnya kemampuan masyarakat untuk membedakan mana yang benar dan manipulatif. Kebenaran menjadi relatif terhadap daya jualnya di ruang digital. Jika suatu narasi mampu menciptakan keterlibatan (*engagement*) tinggi, maka ia akan terus direproduksi oleh algoritma, terlepas dari validitasnya. Dalam situasi demikian, partisipasi politik yang tampak aktif di media sosial tidak selalu berarti kesadaran politik yang matang. Sering kali, itu hanyalah bentuk baru dari konsumsi politik, di mana warga berperan sebagai konsumen narasi, bukan produsen gagasan. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa di abad ke-21 ini, manusia sedang berada dalam era post-truth, yang oleh Yuval Noah Harari disebut sebagai “zaman kebohongan.” Masa di mana manusia tidak lagi menempatkan kebenaran dalam konteks obyektif, tetapi subyektif yang cenderung afektif.³⁴

Dengan demikian, *surveillance capitalism* telah membentuk wajah baru demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi yang beroperasi seperti pasar terbuka, di mana opini, citra, dan bahkan emosi kolektif diperdagangkan dalam mata uang data. Fenomena ini menunjukkan bahwa tantangan demokrasi modern bukan lagi datang dari represi politik secara langsung, melainkan dari kolonisasi kesadaran yang dilakukan melalui teknologi digital. Demokrasi pasar sebenarnya adalah kematian demokrasi (secara substansi). Yang sekarang dan akan terus dihidupi (jika tidak disadari) hanyalah ilusi demokratisasi, demokrasi yang tampak bebas, namun sesungguhnya terikat oleh logika algoritma dan kekuatan modal.

Menggagas Opsi Penyelamatan: Sebuah Ikhtiar

Menghadapi gelombang *surveillance capitalism* dan lahirnya malapetaka demokrasi pasar, penyelamatan demokrasi tidak cukup dilakukan melalui regulasi atau infrastruktur teknologi. Ia menuntut pembaruan etis dan intelektual: upaya untuk mengembalikan manusia

³⁴ Yuval Noah Harari, *21 Lesson: 21 Adab untuk Abad ke 21*. Terj. Haz Algebra (Manado: Globalindo, 2018), hlm. 251-265.

sebagai subjek sadar dalam ruang digital. Opsi penyelamatan ini melibatkan tiga lapisan utama: rekonstruksi kesadaran warga digital, reformasi kebijakan data dan algoritma, serta kebangkitan intelektual organik yang menjadi jembatan antara pengetahuan, masyarakat, dan tindakan politik

Langkah *pertama* adalah memperkuat literasi digital kritis di semua tingkat masyarakat. Literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis menggunakan internet, tetapi kemampuan menilai, menginterpretasi, dan menolak manipulasi informasi. Riset *Global Digital Literacy Index* tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia berada pada angka 3,65 dari skala 10 (kategori sangat rendah), dengan kelemahan utama pada dimensi etika digital dan budaya kritis.³⁵ Dari 70 negara yang menjadi sasaran, Indonesia berada pada posisi ke-62. Bahkan, ditemukan bahwa 41% pengguna internet di Indonesia sulit membedakan berita palsu dari fakta.³⁶ Fakta ini menunjukkan bahwa demokrasi digital kita masih rapuh karena masyarakat sering menjadi konsumen informasi, bukan penafsir aktif. Oleh karena itu, pendidikan literasi digital yang menanamkan kemampuan berpikir reflektif dan tanggung jawab moral menjadi pondasi utama penyelamatan demokrasi.

Kedua, penguatan regulasi perlindungan data dan transparansi algoritma harus menjadi prioritas. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan, namun pelaksanaannya masih belum efektif. Banyak platform digital masih leluasa mengakses, mengolah, bahkan memperjualbelikan data pengguna untuk kepentingan ekonomi dan politik. Selain itu, dalam tulisan ini penulis menyampaikan kekecewaan besar terhadap model kompromi bisnis Presiden Prabowo yang baru-baru ini justru "menjual" data pribadi seluruh masyarakat Indonesia ke Amerika Serikat. Padahal, data pribadi adalah bagian dari hak asasi digital yang menentukan otonomi individu di ruang publik. Dalam konteks demokrasi, keterbukaan algoritma juga penting agar publik mengetahui bagaimana konten politik, berita, dan kampanye disebarluaskan.

Ketiga, penyelamatan demokrasi harus dilakukan melalui inklusi digital yang adil, terutama bagi masyarakat di wilayah rural. Data dari APJII tahun 2025 menunjukkan bahwa 62% penduduk pedesaan masih mengalami keterbatasan akses internet berkualitas. Ketimpangan ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal kesetaraan politik, karena mereka yang tidak terhubung secara digital seringkali tersingkir dari wacana publik nasional. Program seperti Desa Digital dan Gerakan Nasional Literasi Digital adalah langkah awal, namun perlu dilengkapi dengan pelibatan masyarakat lokal agar ruang digital menjadi wadah partisipasi, bukan sekadar penerima informasi.

Namun, upaya-upaya teknis ini tidak cukup tanpa kehadiran intelektual organik. Mengambil gagasan Antonio Gramsci, intelektual organik adalah mereka yang lahir dari dalam masyarakat dan berfungsi untuk mengartikulasikan kesadaran kolektif menuju perubahan

³⁵ Bulya Bulya & Suci Izzati, "Indonesia's Digital Literacy as a Challenge for the Democracy in the Digital Age," dalam *The Journal of Society and Media*, Vol. 8, No. 2 (2024), hlm. 642. <https://doi.org/10.267/jsm.v8n2.p640-661>.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 650.

sosial.³⁷ Dalam konteks Indonesia, mahasiswa, akademisi, jurnalis independen, dan aktivis digital dapat berperan sebagai intelektual organik baru yang menolak tunduk pada algoritma kapitalisme pengawasan. Mereka bukan sekadar pengguna teknologi, melainkan penggerak pemaknaan, yaitu menghidupkan diskursus yang rasional, kritis, dan berakar pada kepentingan rakyat.

Peran intelektual organik sangat relevan dengan konteks bonus demografi. Indonesia memiliki lebih dari 190 juta penduduk usia produktif yang tumbuh bersama internet. Jika mereka dilatih dengan semangat intelektual organik, bonus demografi ini dapat menjadi “bonus kesadaran,” yakni generasi yang tidak hanya pandai mengonsumsi informasi, tetapi juga mampu mencipta wacana tandingan terhadap narasi palsu yang diproduksi oleh politik pencitraan. Mahasiswa dan komunitas pemuda digital dapat memanfaatkan media sosial sebagai arena counter-narrative terhadap manipulasi informasi. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul gerakan-gerakan digital berbasis isu seperti lingkungan, hak asasi manusia, dan transparansi politik yang menandakan munculnya kesadaran baru di luar sistem formal kekuasaan, misalnya pendirian *Malaka Project* oleh Ferry Irwandi dan kawan-kawan.

Penutup

Pada akhirnya, tulisan ini menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi tidak bergantung pada banyaknya jumlah penduduk usia produktif, melainkan pada kualitas kesadaran politik dan etika digital generasi mudanya. Di tengah arus deras *surveillance capitalism*, ruang demokrasi kita telah direduksi menjadi pasar opini, tempat kebenaran ditukar dengan algoritma dan gagasan ditenggelamkan oleh citra. Bonus demografi yang semestinya menjadi energi pembaruan sosial justru terancam menjadi jebakan kesadaran palsu jika generasi muda gagal membebaskan dirinya dari kendali kapitalisme digital. Karena itu, penyelamatan demokrasi Indonesia mensyaratkan lahirnya manusia digital yang otonom, mereka yang tidak tunduk pada logika data, tetapi berpikir dan bertindak atas dasar nurani kritis. Literasi digital, etika bermedia, dan kebangkitan intelektual organik harus menjadi strategi kultural untuk mengembalikan politik sebagai ruang rasional, bukan pasar emosi. Jika kesadaran kolektif ini tumbuh, bonus demografi tidak akan berakhir sebagai bonus statistik semata, tetapi menjadi tonggak lahirnya bonus kesadaran, yakni generasi yang menjinakkan teknologi, menundukkan pasar, dan menjadikan demokrasi sebagai proyek kemanusiaan yang utuh, bebas, reflektif, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

³⁷ Rikardus Manteiro, “Transformasi Kaum Akademisi Menjadi Intelektual Organik untuk Memperkuat Demokrasi Indonesia,” dalam *Akademika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 23, No. 1 (2024), hlm. 13-26. <https://journal.iftkledalero.ac.id/index.php/AKD/article/view/23>.

- Andriyendi, Dimaz Oktama, dkk., “Media Sosial dan Pengaruhnya terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pilkada” dalam *JECCO: Jurnal of Education, Cultural and Politics*, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 101-111. <https://doi.org/10.24036/jecco.v3i1.172>.
- APJII, *Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Pengguna Internet* (APJII: Online, 2025). <https://survei.apjii.or.id/survei/group/11>.
- Azis, Hasbullah. “Dampak Media Baru terhadap Partisipasi dan Keterlibatan Politik Anak Muda: Sebuah Tinjauan Studi Empiris,” dalam *Jurnal Common*, Vol. 8, No. 2 (2024), hlm. 148-163. <https://doi.org/10.3410/common.v8i2.12823>.
- Baghi, Felix. *Kewargaan Demokratis dalam Sorotan Filsafat Politik* (Maumere: Ledalero, 2009)
- Bappenas, *Visi Indonesia Emas 2045* (Jakarta: Tim Bappenas, 2019), hlm. 20-21. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Dokumen%20lengkap%202045_final.pdf.
- BPS Indonesia, *Analisis Profil Penduduk Indonesia: Mendeskripsikan Peran Penduduk dalam Pembangunan* (Online: Badan Pusat Statistik, 2022), hlm. 55. <https://share.google/vAC0NBVbvrS7NUfLc>.
- Bulya, B. & Izzati, S. “Indonesia’s Digital Literacy as a Challenge for the Democracy in the Digital Age,” dalam *The Journal of Society and Media*, Vol. 8, No. 2 (2024), hlm. 642. <https://doi.org/10.267/jsm.v8n2.p640-661>.
- Harari, Yuval Noah. *21 Lesson: 21 Adab untuk Abad ke 21. Terj. Haz Algebra* (Manado: Globalindo, 2018).
- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2009),
- Jati, Wasisto Raharjo. “Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang atau Jendela Bencana di Indonesia?” dalam *Populasi: Jurna Kependudukan dan Kebijakan*, Vol. 23, No. 1 (2015), hlm. 3-4. <https://doi.org/10.22146/jp.8559>.
- Jebadu, Alexander SVD. *Drakula Abad ke-21* (Maumere: Ledalero, 2020).
- Jehalut, Ferdinandus. “Ekonomi Politik, Internet, dan Demokrasi,” dalam *Jurnal Ledalero*, Vol. 22, No. 1 (2023), hlm. 30. <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v22i1.333.20-38>.
- Jonathan, Ariel dkk., “Pengaruh Penggunaan Istilah *Gemoy* terhadap Citra Politik Calon Presiden dalam Pemilu 2024,” dalam *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 3, No. 6 (2024). Hlm. 83-89. <https://doi.org/10.56799/jim.v3i6.3388>.
- Judhita, Christiany. “Demokrasi di Media Sosial: Kasus Polemik rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah,” dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 1 (2016), hlm. 1-15. <https://media.neliti.com/media/publications/231005-demokrasi-di-media-sosial-kasus-polemik-94e515fe.pdf>.

- Lewar, Paulus Pati & Madung, Otto Gusti Ndegong. "Demokrasi Sebagai Diskursus dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas," dalam *Jurnal Ledalero*, Vol. 21, No. 2 (Desember 2022), hlm. 158-159. <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v21i2.314.150-161>.
- Madung, Otto Gusti. "Populisme, Demokrasi, Disensus dan Relevansinya untuk Indonesia," dalam Mathias Daven & Georg Kirchberger, *Sebuah Pertanyaan Kenangan 50 Tahun STFK Ledalero* (Maukere: Ledalero, 2019), hlm. 144-149.
- Manteiro, Rikardus. "Transformasi Kaum Akademisi Menjadi Intelektual Organik untuk Memperkuat Demokrasi Indonesia," dalam *Akademika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 23, No. 1 (2024), hlm. 13-26. <https://journal.iftkledalero.ac.id/index.php/AKD/article/view/23>.
- Ramiro, Monica Arenas. "Partidos Politicos, Opiniones E Internet: La Leison Del Derecho A La proteccion De Datos Personales," dalam *Teoria y Realidad Constitucional*, Vol. 44 (2019), hlm. 341-372. Diakses melalui *Proquest Research Library* (Akun IFTK Ledalero). <https://www.proquest.com/docview/2420727124/fulltext/75993405C0154986PQ/1?acountid=215812&sourcetype=Scholarly%20Journals>.
- Santoso, Anton. "Indonesia's internet penetration hits 79.5 percent, trend continues," dalam ANTARA (24 Januari 2024). <https://en.antaranews.com/news/304593/indonesias-internet>.
- Sugiono, Shidiq. "Fenomena Industri Buzzer di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media" dalam COMMUNICATUS: Jurnal Ilmu Komunikasi, 4:1 (2020), hlm. 47-66. <https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.7250>.
- Suryahudaya, Edbert Gani. "Bonus Demografi dan Bonus Demokrasi," dalam *Kompas.id* (21 November 2022). <https://app.komp.as/AebLkFskXG5mVgYV6>.
- Sutikno, Achmad Nur. "Bonus Demografi di Indonesia," dalam *VISIONER: Jurnal Pemerintahan daerah Di Indonesia*, Vol. 12, No. 1 (2020), hlm. 421-439. <https://doi.org/10.54783/jv.v12i2.285>.
- Ulya, Fika Nurul & Rastika, Icha. "Survei Indikator: Pemilih Prabowo Banyak dari Gen Z dan Milenial, Pemilih Ganjar Dominasi Kalangan Tua," dalam *Kompas.com* (21 Februari 2024).
- Wahyudi, M. Zaid. "Bonus Demografi tidak Terjadi Tahun 2030-2045, dalam *Kompas.id* (29 April 2025). <https://www.kompas.id/artikel/bonus-demografi-tidak-terjadi-di-tahun-2030-2045>.
- Zuboff, Shoshana. "Surveillance Capitalism and the Challenge of Collective Action," dalam *New Labour Forum*, Vol. 28, No. 1 (2019), hlm. 11-12. <https://doi.org/10.1177/1095796018819461>.

_____, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power* (New York: Public Affairs, 2019).